

**PENGARUH DANA BAGI HASIL SDA DAN PDRB SEKTOR
PERTAMBANGAN TERHADAP PENGELOUARAN KONSUMSI
PEMERINTAH DI EMPAT PROVINSI PENGHASIL MINERAL DI
INDONESIA**



Skripsi Oleh :

SAYYID MUHAMMAD ABDURRAHMAN

01021281722048

Ekonomi Pembangunan

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana
Ekonomi/Magister/Doktor*

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN

TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2021

LEMBARAN PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

**PENGARUH DANA BAGI HASIL SDA DAN PDRB SEKTOR PERTAMBANGAN
TERHADAP PENGELOUARAN KONSUMSI PEMERINTAH DI EMPAT PROVINSI
PENGHASIL MINERAL DI INDONESIA**

Disusun Oleh:

Nama : Sayyid Muhammad Abdurrahman
NIM : 01021281722048

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian/ Konsentrasi : Keuangan Daerah

Di setujui untuk digunakan dalam Ujian Komprehensif

Tanggal Persetujuan

Dosen Pembimbing

Ketua

Tanggal : 13 - 9 - 2021

Prof. Syamsurijal, AK, Ph.D

NIP. 195212121981021001

Anggota

Tanggal : 12 - 7 - 2021

Dr. M. Subardin, S.E, M.Si

NIP. 197110201006041001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENGARUH DANA BAGI HASIL SDA DAN PDRB SEKTOR PERTAMBANGAN
TERHADAP PENGELOUARAN KONSUMSI PEMERINTAH DI EMPAT PROVINSI
PENGHASIL MINERAL DI INDONESIA**

Disusun Oleh:

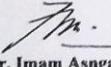
Nama : Sayyid Muhammad Abdurrahman
Nim : 01021281722048
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Ekonomi Pembangunan
Bidang Kajian/ Konsentrasi : Keuangan Daerah

**Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 08 Oktober 2021 dan telah memenuhi
syarat untuk diterima.**

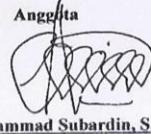
Panitia Ujian Komprehensif

Palembang, 08 Oktober 2021

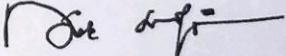
Ketua


Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si
NIP. 197306072002121002

Anggota

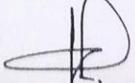

Dr. Muhammad Subardin, S.E., M.Si
NIP. 197110302006041001

Anggota


Prof. Dr. H. Didik Suseviyo, M.Si
NIP. 196007101987031003

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan


Dr. Mukhlis, S.E., M.Si
NIP. 197304062010121001

ASLI
JUR. EK. PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI UNSIK
4 - II - 2021

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Nama : Sayyid Muhammad Abdurrahman

Nim : 01021281722048

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Ekonomi Pembangunan

Bidang Kajian/ Konsentrasi : Keuangan Daerah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi saya yang berjudul “Pengaruh Dana Bagi Hasil SDA dan PDRB Sektor Pertambangan Terhadap Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di Empat Provinsi Penghasil Mineral di Indonesia”

Pembimbing

Ketua : Dr. Imam Asngari, S.E, M.Si

Anggota : Dr. Muhammad Subardin, S.E, M.Si

Tanggal Ujian : 08 Oktober 2021

Adalah benar hasil karya saya sendiri. Dalam skripsi tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila pernyataan ini saya tidak benar dikemudian hari, maka saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar sarjana.

Palembang, 27 Oktober 2021

Pembuat Pernyataan



Sayyid Muhammad Abdurrahman

01021281722048

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil'alamin, atas berkat rahmat dan inayah-Nya jualah sehingga skripsi yang berjudul “Hubungan Dana Bagi Hasil SDA dan PDRB Sektor Pertambangan Terhadap Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di Empat Provinsi Penghasil Mineral di Indonesia” ini dapat terselesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan Penelitian ini bisa tercapai berkat bantuan sumber-sumber referensi yang sangat membantu dalam penulisan. Penulis mengucapkan terima kasih dari semua pihak yang telah mendukung dan membantu didalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa masih belum sempurna, disini penulis mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca, akhir kata penulis ucapkan terimakasih serta berharap skripsi ini dapat bermanfaat.

Palembang, Oktober 2021

Penulis,

Sayyid Muhammad Abdurrahman
NIM. 01021281722048

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama penulisan dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala dan kesalahan. Semua dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat dan rahmat-Nya serta berkat solawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga saya bisa diberikan kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Aba dan ibuku tercinta yang telah memberikan dukungan dan motivasi agar bisa menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, M.S.C.E selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Muhammad Adam, S.E, M.E selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Mukhlis, S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya.
6. Bapak (Alm). Prof. H. Syamsurijal AK, Ph.D, Bapak Dr. Imam Asngari, S.E, M.Si, dan Bapak Dr. Muhammad Subardin, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi ini yang telah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk membimbing serta memberikan saran dan kritik dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Prof. Dr. H. Didik Susetyo, M.Si selaku Dosen Penguji yang telah membantu memberikan saran, dan kritik sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak/ Ibu Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya khususnya Dosen Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan.

9. Mbak Yosi selaku Pengelola Jurusan Ekonomi Pembangunan yang telah membantu penulis dalam mengurus seluruh urusan administrasi dan kepentingan lainnya saat menjalani perkuliahan hingga skripsi.
10. Habib Sayyid Umar Muhammad Al-Munawwar Al-Hafidz selaku Syaikhuna wa Murabbi Ruhina yang telah memberikan ilmu dan doanya.
11. Keluarga besar Alwie Jamalullail dan Abdillah Hassan yang telah memberikan dukungan penuh dan motivasi selama masa perkuliahan hingga penyelesaian penulisan skripsi.
12. Perfect Boss EP, CBU FC, dan teman-teman lainnya terima kasih telah memberi bantuan dalam perkuliahan hingga penyelesaian penulisan skripsi.
13. Teman-teman jurusan Ekonomi Pembangunan angkatan 2017, terima kasih untuk semua yang telah kita lalui selama masa perkuliahan.

Palembang, Oktober 2021

Sayyid Muhammad Abdurrahman
NIM. 01021281722048

ABSTRAK

PENGARUH DANA BAGI HASIL SDA DAN PDRB SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP PENGELOUARAN KONSUMSI PEMERINTAH EMPAT PROVINSI PENGHASIL MINERAL DI INDONESIA

Oleh:

Sayyid Muhammad Abdurrahman; Imam Asngari; Muhammad Subardin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Dana Bagi Hasil SDA dan PDRB Sektor Pertambangan terhadap Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di Empat Provinsi Penghasil Mineral di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik periode 2011-2020. Teknik analisis yang digunakan adalah metode regresi data panel dengan menggunakan model *fixed effect*. Hasil menunjukkan Dana Bagi Hasil berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah di Empat Provinsi Penghasil Mineral di Indonesia. Hasil menunjukkan PDRB Sektor Pertambangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di Empat Provinsi Penghasil Mineral di Indonesia.

Kata Kunci: Dana Bagi Hasil , PDRB, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

Ketua

Dr. Imam Asngari, S.E, M.Si

NIP. 197306072002121002

Anggota

Dr. Muhammad Subardin, S.E, M.Si

NIP. 197110302006041001

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Pembangunan

Dr. Mukhlis, S.E, M.Si

NIP. 197304062010121001

ABSTRACT

THE EFFECT OF FUNDS FOR SDA PRODUCTS AND GRDP OF THE MINING SECTOR ON THE GOVERNMENT'S CONSUMPTION EXPENDITURES OF FOUR MINERAL PROVINCE IN INDONESIA

By:

Sayyid Muhammad Abdurrahman; Imam Asngari; Muhammad Subardin

This study aims to determine the effect of the Natural Resources Revenue Sharing Fund and GRDP in the Mining Sector on Government Consumption Expenditures in Four Mineral Provinces in Indonesia. The data used in this study is secondary data sourced from the Central Statistics Agency for the period 2011-2020. The analysis technique used the panel data regression method using a fixed effect model. The results show that the Revenue Sharing Fund has a positive but not significant effect on Government Expenditures in the Four Mineral Provinces in Indonesia. The results show that the GRDP of the Mining Sector has a positive and significant effect on Government Consumption Expenditures in the Four Mineral Provinces in Indonesia.

Keywords: Revenue Sharing Fund, GRDP, Government Consumption Expenditure

Chairman

Dr. Imam Asngari, SE, M.Si

NIP. 197306072002121002

Member

Dr. Muhammad Subardin, SE, M.Si

NIP. 197110302006041001

Approved by,

Head of Development Economics Program

Dr. Mukhlis, SE, M. Si

NIP. 197304062010121001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
	Nama : Sayyid Muhammad Abdurrahman NIM : 01021281722048 Tempat, Tanggal Lahir: Palembang, 28 Desember 1999 Alamat : Jl. Dr. M. Isa Lrg. Gubah No 60J Handphone : 085789276028
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Laki-laki
Status	Belum Menikah
Tinggi Badan	185 cm
Berat Badan	120 kg
Email	Sayyid28abdurrahman@gmail.com
PENDIDIKAN	
2004-2005	TPA At-Thoriq
2005-2011	MI. Adabiyah 2 Palembang
2011-2014	SMP Adabiyah Palembang
2014-2017	SMA Negeri 18 Palembang
2017-2021	Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya
Pengalaman Organisasi	Ketua Humas YAP's (Youth Alawiyyin Palembang Society) 2019-2020
Prestasi	Juara 3 Lomba Musabaqohh Tilawatil Qur'an Kategori Murrotal Putra dalam Ragka Dies Natalis ke 61 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Tahun 2021 Juara 3 Lomba Musabaqohh Tilawatil Qur'an Kategori Murrotal Putra dalam Ragka Dies Natalis ke 59 Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya Tahun 2019 Juri " BIWIDUPA FEST 2019 " Kategori Lomba Adzan dan Da'i & Da'iyah antar Pelajar SMP/SMA se-Kota Palembang

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF	ii
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
ABSTRAK BAHASA INDONESIA	viii
ABSTRAK BAHASA INGGRIS	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GRAFIK	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	7
1.2 Perumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori	10
2.1.1 Teori Pengeluaran Pemerintah	10
2.1.2 Perhitungan Pendapatan Nasional	15
2.1.2.1 Metode-metode Perhitungkan Pendapatan Nasioanal	17
2.1.2.2 Perhitungan PDB dan Masalah Kesejahteraan Sosial.....	20
2.1.2.3 Kelemahan Perhitungan PDB Per Kapita	21

2.1.3 Pertumbuhan Ekonomi	22
2.1.3.1 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik.....	23
2.1.3.2 Teori Pertumbuhan <i>Endogenous</i> (TPE)	24
2.1.3.3 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	27
2.2. Konsep dan Definisi	29
2.2.1 Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.....	29
2.2.2 Dana Bagi Hasil (DBH)	30
2.2.2.1 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	31
2.2.3 Produk Domestik Regional Bruto Sektor Pertambangan	31
2.3. Penelitian Terdahulu	32
2.4. Kerangka Pemikiran	40
2.5. Hipotesis	42
BAB III METODE PENELITIAN	43
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	43
3.2. Data	43
3.2.1 Jenis Data	43
3.2.2 Sumber Data	44
3.2.3 Data Menurut Waktu	44
3.3. Metode Pengumpulan Data.....	44
3.4. Teknik Analisis	45
3.5. Model Regresi Data Panel	46
3.5.1 Model Common Effect.....	46
3.5.2 Model Fixed Effect.....	46
3.5.3 Model Rondom Effect	47
3.6 Pemilihan Model Estimasi Regresi Data Panel	47
3.6.1 Uji Chow	47

3.6.2 Uji Hausman.....	48
3.6.3 Uji Lagrange Multiplier.....	49
3.7. Uji Asumsi Klasik.....	50
3.7.1 Uji Normalitas	50
3.7.2 Uji Autokorelasi	51
3.7.3 Uji Heteroskedasitas	51
3.7.4 Uji Multikolinearitas	52
3.7.5 Uji t.....	53
3.7.6 Uji Koefisien Determinasi (R2)	54
3.8. Definisi Oprsional.....	54

BAB IV HASIL DAN PENELITIAN PEMBAHASAN.....	56
4.1. Hasil Penelitian	56
4.1.1 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	56
4.1.2 Perkembangan Dana Bagi Hasil SDA.....	58
4.1.3 Perkembangan PDRB Sektor Pertambangan	63
4.2. Analisis Regresi	63
4.2.1 Pengujian Regresi Data Panel	63
4.2.2 Hasil Regresi Dana Panel	64
4.2.2.1 Hasil Analisis Regresi Dana Panel	69
4.3 Analisis Individu.....	70
4.4. Hasil Uji Asumsi Klasik	72
4.4.1 Uji Normalitas	72
4.4.2 Uji Multikolonieritas	73
4.4.3 Uji Aoutokorelasi	74
4.4.4 Uji Heterokedastisitas.....	75
4.5.Pembahasan	76

4.5.1. Pengaruh Dana Bagi Hasil SDA Terhadap Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	76
4.5.2. Pengaruh PDRB Pertambangan Terhadap Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	78
BAB V PENUTUP.....	81
5.1. Kesimpulan	81
5.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	84
LAMPIRAN.....	89

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam Sektor Pertambangan berdasar harga konstan 2011-2020	3
Tabel. 1.2 Perkembangan Dana Bagi Hasil SDA di Empat Provinsi Penghasil Mineral 2011-2020 (Juta Rupiah)	4
Tabel 4.1 Persentase Proporsi Pengeluaran Konsumsi Pemerintah Terhadap Total PDRB Pengeluaran berdasar harga konstan 2011-2020...	57
Tabel 4.2 Distribusi Persentase dan Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Pertambangan di Empat Provinsi Penghasil Mineral Tahun 2011- 2020	61
Tabel 4.3 Hasil Uji Chow	63
Tabel 4.4 Hasil Estimasi Menggunakan Hausman Test	64
Tabel 4.5 Perbandingan Model Common, Fixed, dan Rondom Effect Pengaruh Dana Bagi Hasil SDA dan PDRB Sektor Pertambangan Terhadap Pengeluaran Konsusmi Pemerintah	64
Tabel 4.6 Model <i>Fixed Effect</i> Pengaruh Dana Bagi Hasil SDA dan PDRB Sektor Pertambangan Terhadap Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	66
Tabel 4.7 Perbaikan Durbin Watson.....	67
Tabel 4.8 Hasil Analisis Regresi Data Panel	69
Tabel 4.9 Fixed Effect Model Individu.....	71
Tabel 4.7 Hasil Estimasi Uji Multikolonieritas	73
Tabel 4.8 Hasil Estimasi Uji Multikolonieritas	74
Tabel 4.9 Hasil Estimasi Uji Autokorelasi.....	74
Tabel 4.10 Hasil Perbaikan Estimasi Uji Autokorelasi.....	75
Tabel 4.11 Hasil Estimasi Uji Heterokedastisitas.....	75

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di Empat Provinsi Penghasil Mineral 2011-2020 (Juta Rupiah)	6
Grafik 4.1 Perkembangan Dana Bagi Hasil SDA di Empat Provinsi Penghasil Mineral 2011-2020 (Juta Rupiah)	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kurva Wegner	12
Gambar 2.2 Kurva Peacock dan Wisman	14
Gambar 2.3 Kurva Pertumbuhan <i>Endogenous</i>	25
Gambar 2.4 Kerangka Pemikiran.....	41
Gambar 4.1 Uji Normalitas	73

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Data-data variabel.....	89
Lampiran 2: Uji Chow	90
Lampiran 3: Uji Hausman.....	90
Lampiran 4 : Common Effect Model.....	91
Lampiran 5: Fixed Effect Model.....	91
Lampiran 6 : Rondom Effect Model	92
Lampiran 7: Uji Normalitas	92
Lampiran 8 : Perbaikan Durbin Watson	93
Lampiran 9 : Fixed Effect Model Individu	94
Lampiran 10 : Uji Heterokedastisistas	95
Lampiran 11 : Uji Autokorelasi	96
Lampiran 12 : Perbaikan Uji Autokorelasi	97
Lampiran 13 : Uji Multikolonieritas	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengeluaran pemerintah merupakan salah satu tindakan campur tangan pemerintah dalam menangani masalah perekonomian yang menurut hukum Wagner pengeluaran pemerintah ini selalu meningkat dari waktu kewaktu, namun apakah pengeluaran pemerintah bisa efektif dalam kebijakan makro ekonomi seperti mengendalikan inflasi atau pertumbuhan ekonomi suatu negara/pemerintahan. Dalam hal ini pengeluaran pemerintah ini berbeda-beda pada setiap pemerintahan diakibatkan oleh perbedaan dari sumber penerimaan/pendapatan karena setiap daerah tidak memiliki potensi yang sama untuk mendapat sumber penerimaan dan keberlanjutan penerimaan persoalan berikutnya apakah pengeluaran konsumsi pemerintah bisa mendorong proses penciptaan penerimaan dari dana bagi hasil atau peningkatan output PDRB atau pertumbuhan ekonomi.

Menurut Badan Pusat Statistik (2019) pengeluaran konsumsi pemerintah didefinisikan sebagai nilai dari keseluruhan jenis output pemerintah dikurangi nilai output untuk pembentukan modal sendiri dikurangi dengan nilai penjualan barang/ jasa ditambah dengan nilai barang/ jasa yang dibeli dari produsen pasar untuk diberikan kepada rumah tangga secara gratis yang sebenarnya tidak signifikan secara ekonomi. Ciri pokok dari pengeluaran konsumsi pemerintah ini ialah pungutan pembayarannya tidak sesuai dengan biaya yang telah dikeluarkan. Hasil penjualannya diartikan sebagai pendapatan jasa yang diberikan dari output

pemerintah biasanya dari output non pasar lainnya, yakni output yang dihasilkan serta dipergunakan sendiri oleh pemerintah atau disebut konsumsi pemerintah.

Secara makro ekonomi pengeluaran pemerintah merupakan salah satu daripada komponen *agregat demand* dalam persamaan pendapatan nasional yakni:

Keterangan: Y= Pendapatan Nasional

C= Pengeluaran Rumah Tangga

I= Investasi

G= Pengeluaran pemerintah

dimana Y merupakan *agregat supply* dan C+I+G *agregat demand* jika terjadi kenaikan *agregat demand* dalam hal ini pengeluaran pemerintah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebagai *agregat supply*. Namun demikian permasalahan yang seberapa besar pengeluaran pemerintah bisa langsung meningkatkan pendapatan nasional.pendapatan pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran ini bersumber dari sebagai daerah/ negara yang dikaruniai kekayaan alam pada umum nya masih bersumber dari kekayaan sumber daya alam dan bisa disebut menjalankan perekonomian berbasis mineral.

Perekonomian mineral itu didefinisikan sebagai Negara-negara berkembang yang menghasilkan setidaknya 8 persen dari PDB sektor pertambangan mineral, sehingga dapat pula dikatakan bahwa suatu provinsi yang apabila menghasilkan lebih dari 8 persen dari PDRB sektor pertambangan, dapat disebut sebagai provinsi berperekonomian mineral, termasuk didalamnya adalah

Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Papua. Hal ini dapat dilihat dari table 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1 Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam Sektor Pertambangan berdasar harga konstan 2011-2020

Tahun	Riau	SUMSEL	KALTIM	Papua
2011	31,86	23,14	50,07	33,71
2012	30,16	22,63	51,28	43,37
2013	28,22	22,22	51,05	43,21
2014	25,99	21,86	49,99	40,10
2015	24,17	21,77	50,01	40,60
2016	22,66	21,47	48,43	42,07
2017	20,66	21,45	47,80	41,77
2018	19,08	22,01	47,06	43,00
2019	17,00	22,64	48,01	29,00
2020	16,32	21,70	47,17	32,97
Rata-rata	23,61	22,08	49,08	38,98

Sumber: Indonesia Dalam Angka, Berbagai Edisi, Badan Pusat Statistik Indonesia

Dari data diatas dapat diketahui bahwa provinsi-provinsi tersebut menghasilkan lebih dari 8 persen dari PDRB sektor pertambangan yang berarti pendapatan di empat provinsi ini masih bergantung dengan sumber daya alam yakni dari pertambangan mineral, dengan tambang mineral yang begitu luas dan berperan besar terhadap perekonomian maka pemerintah daerah bisa saja mendapatkan penerimaan daerah dari dana bagi hasil sumber daya alam (Auty, 1993: 3).

Dalam membiayai pengeluaran konsumsi pemerintah ini dibutuhkan penerimaan daerah, sedangkan penerimaan daerah pada masing-masing provinsi berbeda beda karena dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah (PAD) meliputi pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan penerimaan lainnya. Sehingga pemerintah pusat memberikan sejumlah bantuan

seperti dana perimbangan dalam hal ini Dana Bagi Hasil SDA untuk dapat menurunkan ketimpangan vertikal (*vertical imbalance*) antara pemerintah pusat dan daerah. Namun pada sisi lain Dana Bagi Hasil SDA juga dapat mempertajam ketimpangan secara horizontal (*horizontal imbalance*) yang dialami oleh penghasil dan bukan penghasil sumber daya alam (Mustofa, 2010: 2).

Daerah yang memiliki potensi atau anugerah kekayaan sumber daya mineral di provinsi yang ada di Indonesia antara lain: Provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, Irian Barat, Aceh, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Provinsi-provinsi inilah yang menjadi pusat utama pertambangan dan penggalian sumber mineral di Indonesia. Akan tetapi dalam skripsi ini akan diambil data dari empat provinsi saja yaitu Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur, dan Papua. Untuk perkembangan Dana Bagi Hasil SDA dapat dilihat pada tabel 1.2 dibawah ini:

Tabel. 1.2 Perkembangan Dana Bagi Hasil SDA di Empat Provinsi Penghasil Mineral 2011-2020 (Juta Rupiah)

Tahun	Riau	SUMSEL	KALTIM	Papua
2011	2.513.769.700	933.824.102	4.517.251.513	275.748.034.522
2012	2.234.772.670	1.127.002.329	5.268.684.084	130.708.426
2013	2.226.231.958	1.180.856.653	4.446.313.562	200.789.929
2014	2.698.594.352	1.385.670.590	3.532.243.333	287.888.085
2015	1.074.930.738	749.983.666	3.166.218.336	430.914.337
2016	827.647.310	631.146.675	2.154.070.925	487.428.302
2017	749.548.072	869.855.925	1.101.073.441	155.188.607
2018	864.950.038	936.907.319	2.391.882.976	670.366.817
2019	865.867.792	931.599.821	2.401.147.845	402.269.621
2020	944.144.814	1.314.226.460	1.939.324.703	410.125.122

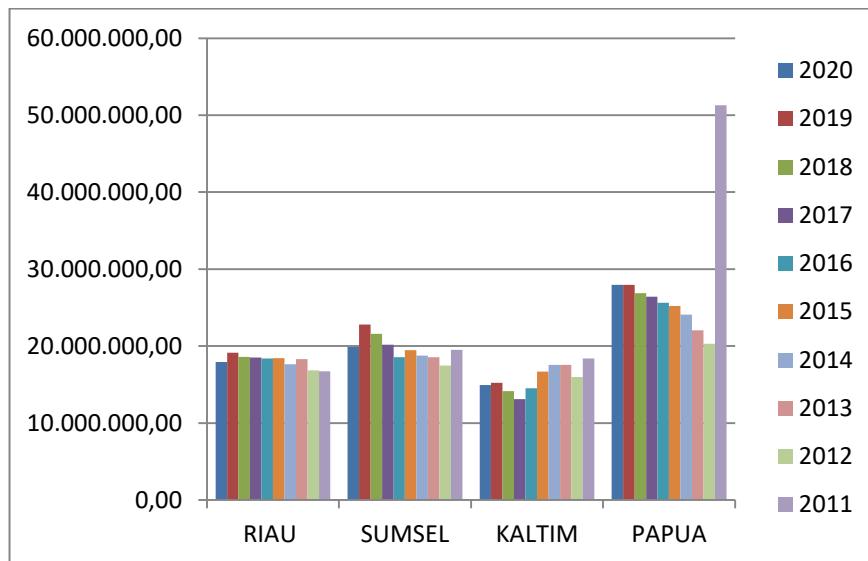
Sumber: Indonesia Dalam Angka, Berbagai Edisi, Badan Pusat Statistik Indonesia

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa penerimaan Dana Bagi Hasil SDA di empat Provinsi Penghasil Mineral berbeda-beda. Dari tabel tersebut dapat dilihat juga bahwa Kalimantan Timur berada diposisi pertama dalam perolehan penerimaan Dana Bagi Hasil SDA. Pada tiga tahun terakhir yakni pada tahun 2017 Dana Bagi Hasil SDA yang didapatkan oleh Provinsi Kalimantan Timur sebesar 1.101.073.441, selanjutnya pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan sebesar 2.391.882.976 diikuti ditahun 2019 naik sebesar 2.401.147.845 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kemerosotan menjadi 1.939.324.703. Hal ini dikarenakan hasil sumber daya alamnya berkualitas baik, sehingga sebagian besar dapat diexpor ke luar negeri. Inilah yang membuat Provinsi Kalimantan Timur bisa disebut sebagai penghasil devisa bagi Indonesia didalam sektor pertambangan. (sindonews.com)

Untuk tiga provinsi lainnya seperti Provinsi Riau, Sumatera Selatan dan Papua, apabila dilihat dari tiga tahun terakhir, maka jumlah Dana Bagi Hasil SDA yang didapat oleh Provinsi Sumatera Selatan-lah yang menjadi urutan kedua yakni sebesar 1.314.226.460. Untuk Provinsi Riau jumlah Dana Bagi Hasil SDA-nya lebih kecil dibandingkan Provinsi Sumatera Selatan, namun ditiga tahun terakhir selalu meningkat penerimaan Dana Bagi Hasil SDA-nya menjadi 944.144.814. Sedangkan Provinsi Papua di tahun 2020 mengalami peningkatan dalam penerimaan Dana Bagi Hasil SDA sebesar 410.125.122.

Berdasarkan perkembangan penerimaan Dana Bagi Hasil SDA diatas bisa kita lihat pula bagaimana perkembangan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah pada empat provinsi penghasil mineral dalam grafik 1.1 sebagai berikut:

Grafik 1.1 Perkembangan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di Empat Provinsi Penghasil Mineral 2011-2020 (Juta Rupiah)



Sumber: Indonesia Dalam Angka, Berbagai Edisi, Badan Pusat Statistik Indonesia

Melihat dari grafik 1.1 diatas maka pengeluaran pemerintah dari keempat Provinsi tersebut pada lima tahun terakhir maka pengeluaran terbesar ada di provinsi Papua sebesar Rp. 27,957,09 ditahun 2020. Pada posisi kedua ada Provinsi Sumatera Selatan dengan pengeluaran terbesar tahun 2020 sebanyak Rp 19,869,06. Selanjutnya Provinsi Riau dengan pengeluaran terbesar pada tahun 2020 sebesar Rp 17,912,34. Terakhir ialah Provinsi Kalimantan Timur dengan pengeluaran yakni Rp 14,917,55.

Namun dengan adanya sumber penerimaan dari dana bagi hasil SDA untuk dikelola menjadi pengeluaran konsumsi pemerintah, masih saja terjadi ketertinggal dalam pembangunan yang dilakukan daerah-daerah tersebut, seperti Provinsi Papua misalnya walaupun kaya akan sumber daya alam yang luar biasa

akan tetapi masih tertinggal dalam hal infrastruktur. juga untuk provinsi-provinsi lain masih terus mengupayakan dalam mensejahterakan masyarakatnya, dari kondisi ini menunjukkan bahwa masih ada permasalahan dalam pengelolaan dana yang diterima untuk selanjutnya dikelola sebagai pengeluaran konsumsi pemerintah. Karena semakin besar dana yang diterima maka semakin besar pula pengeluaran konsumsi pemerintah, dan jika pengeluaran konsumsi maka perekonomian akan menjadi meningkat pula serta mungkin bisa meningkatkan kesejahteraan provinsi tersebut.

Berdasarkan hasil latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk mengetahui sejauh mana pengaruh dana bagi hasil SDA dan PDRB sektor pertambangan terhadap pengeluaran konsumsi pemerintah di empat provinsi penghasil mineral di Indonesia.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana perkembangan dana bagi hasil SDA, PDRB pertambangan dan pengeluaran konsumsi pemerintah di empat provinsi penghasil mineral di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh dana bagi hasil SDA dan PDRB pertambangan terhadap pengeluaran konsumsi pemerintah di empat provinsi penghasil mineral di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengetahui perkembangan dana bagi hasil SDA, PDRB pertambangan dan pengeluaran konsumsi pemerintah di empat provinsi penghasil mineral di Indonesia.
2. Menganalisis pengaruh dana bagi hasil SDA dan PDRB pertambangan terhadap pengeluaran konsumsi pemerintah di empat provinsi penghasil mineral di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Dapat memberi manfaat dalam mengetahui perkembangan kondisi Dana Bagi Hasil SDA di empat Provinsi penghasil mineral di Indonesia.
 - b. Dapat memberi manfaat dalam mengetahui kondisi PDRB sektor pertambangan sebagai acuan Pertumbuhan Ekonomi di empat Provinsi penghasil mineral di Indonesia.
 - c. Dapat memberi manfaat dalam mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil SDA dan PDRB Sektor Pertambangan terhadap Pengeluaran Konsumsi Pemerintah di empat Provinsi penghasil mineral di Indonesia.

d. Penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian ilmu ekonomi keuangan daerah, serta dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang berminat dalam mengembangkan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

2.1. Bagi Penulis

- a. Untuk menambah pengetahuan serta wawasan dalam penggunaan Dana Bagi Hasil SDA dan PDRB Sektor Pertambangan dalam meningkatkan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.
- b. Setelah mendapatkan hasil dari penelitian, diharapkan bisa memberikan referensi pembaca dalam melakukan penelitian lebih lanjut.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan serta sumbangan pemikiran kepada pengambil kebijakan baik pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam menangani pengeluaran konsumsi pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Rahardjo. 2014. *Pertumbuhan Wilayah & Wilayah Pertumbuhan*. Makasar : Graha Ilmu.
- Agustina, Cut Dian. dkk. 2012. *Political Economy Of Natural Resoure Revenue Sharing In Indonesia*. Asia Reseach Centre Working Paper No.55.
- Anitasari, Merri dan Ahmad Soleh. 2013. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bengkulu*. Ekombis Review.
- Azis, Mohammad. 2016. *Pengaruh Dana Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomidi Kabupaten Malinau*. Jurnal Ekonomi Keuangan, dan Manajemen, Volume 12 (1).
- Badan Pusat Statistik. 2021 *Provinsi Papua dalam angka 2021*, Badan Pusat Statistik Provinsi Papua.
- Badan Pusat Statistik, 2021. *Provinsi Kalimantan Timur dalam angka 2021*, Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur.
- Badan Pusat Statistik, 2021. *Provinsi Riau dalam angka 2021*, Badan Pusat Statistik Provinsi Riau.
- Badan Pusat Statistik.2021. *Provinsi Sumatera Selatan dalam angka 2021*. Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan.
- Badrudinn,Rudy. 2012. *Ekonomika Otonomi Daerah*. Edisi Kedua. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Budiono.*Teori Pertumbuhan Ekonomi*.Yogyakarta: PBFE. 1992. hal. 1.
- Dumairy. 2006. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Dumairy. 1999.*Perekonomian Indonesia*. Jakarta : PT Erlangga.
- Fauzi, Akhmad. 2006. Ekonomi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Teori dan Aplikasi. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.

- Gujarati, N Damodar dan Dawn C. Porter. 2012. *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Salemba Empat.
- Gunawan, Yunus. 2013. *Kontribusi PBB Pertambangan Migas Bagi Daerah Penghasil Dalam Pelaksanaan Desentralisasi*. JEJAK Journal of Economics and Policy Vol 6 (1).
- Hakim,Lukman Muhammad. 2014. *Domination Practice in Vision Mission Meaning Production of Mining Region (Discourse Study of Development Policy Kutai Timur Regency, East Kalimantan Province, Indonesia)*.American International Journal of Social Science Vol. 3 (4).
- Iskandar, I. 2012. *Flypaper Effect Pada Unconditional Grant*. Jurnal Ekonomi Pembangunan.
- Jaya, I. P. N.P.K., & Dwirandra, A. A. N. B. 2014. *Pengaruh Pendapatan Asli daerah pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Pemoderasi*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Jhigan, M.L. 2016. Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Khusaini,Moh. 2018.*Keuangan Daerah*. Malang : UB Press halaman 2-3).
- Kuncoro, Mudrajat. 2011. *Metode Kuantitatif*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen: YKPN.
- Lubis, Irwanasyah. 2010. *Menggali Potensi Pajak Perusahaan dan Bisnis dengan Pelaksanaan Hukum*. Jakarta: Gramedia.
- Mahulete, Ummi Khamayanti. 2016. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU) Terdapat Belanja Modal di Kabupaten/ Kota Provinsi Maluku Pada Tahun 2013- 2015*. Eprints Universitas Muhammadiyah Malang.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 2012. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA.
- Mardiasmo. 2005. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah..* Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mulyati,Sri dan Yusriadi. 2017. Pengaruh Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh. Jurnal Visioner & Strategis. Vol 6(2).
- Nasution, Anwar. 2016. *Goverment Decentralization Program In Indonesia*. Asian Development Bank Institute Working Papers Series No. 601.

- Naufal, Muhammad Rafid. 2021. *Pengaruh PDRB Sektor Pertambangan, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Delapan Kabupaten Penghasil Sumber Daya Alam Di Provinsi Sumatera Selatan*. Universitas Sriwijaya Institutional Repository.
- Nurdini, R., Wiranto, A., & Yusriati N. F. 2014. *Analisis Flypaper Effect Pada, Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (BD) Kabupaten/Kota Di Jawa Barat*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol 2(1).
- Nyasha, Sheilla dan Odhiambo, M. Nicholas. 2019. *Impact of Public Expenditure on Economic Growth: A Review of International Literature*. Folio Oeconomica Stetinensis Vol. 19(2).
- Olomola, Philip. (2004). *Conintegration Analysis Causality Testing and Wagners Law: The Case of Nigeria, 1970-2001*. Journal of Social and Economic Development Vol 6(1).
- Pemerintah Kota Balikpapan. 2020. DBH Balikpapan dipangkas 257 miliar. Balikpapan.go.id. 10 November 2020. <https://web.balikpapan.go.id/berita/read/8259>.
- Pradipta,Tiyas Woro dan Bambang Jatmiko.(2018). “*Pengaruh Flypaper Effect,Pendapatan Asli Daerah(PAD) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Belanja Daerah (Studi Empiris pada Provinsi di Indonesia tahun 2014-2016)*”. Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia, Vol. 2 (2).
- Rasyad, Hijir Ismail Adnin. dkk. 2018. *The Effect of Goverment Expenditure in Mineral Industry Development and Value Added of Mineral in Indonesia*. Scientific Research Journal (SCIRJ) Vol 6 (7).
- Republik Indonesia. 2004. *Peraturan Pemerintah (PP). Nomor 55 tahun 2004. Pasal 1 Dana Perimbangan*.Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2004. Sekretariatan Negara. Jakarta.
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.Lembaran Negara RI Tahun 2004. Sekretariat Negara. Jakarta
- Republik Indonesia. 2011. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 101/PMK.02/2011. tentang Klasifikasi Anggaran*.Sekretariat Kabinet RI. Jakarta

- Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*. Lembaran Negara RI Tahun 2014. Sekretariat Negara. Jakarta
- Rochjadi,Achmad. 2006. *Tinjauan Pelaksanaan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Tahun 2004-2005*. Jakarta :Kementerian Keuangan.
- Saragih,Juli Panglima, 2003, *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Solikin,Akhmad. 2018. *Pengeluaran Pemerintah dan Perkembangan Perekonomian(HukumWagner) di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis*. Jurnal info Artha vol 2 (1) Hal 65-89.
- Sudrajat,Agus M dan Irma Diastuti Purnawati. 2015. *Analisis Pengaruh PAD, DBH, DAU, Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Belanja Modal Kabupaten Ngawi 2003-2015*. Jurnal Akuntansi Prodi Akuntansi FEB UNIPMA Vol 1 (1).
- Sukirno, Sadono. 2011. *Makro Ekonomi Teori Pengantar, Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulistyo,Sigit Hanafi. 2016. *Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Dana Perimbangan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Jurnal UNDIP 1(2).
- Suparjito, S., Sarungu, J., Soesilo, A., Samudro, B., & Hasanah, E. (2019). *Pengaruh Konsumsi Pemerintah dan Investasi Pemerintah Sebagai Variabel Intervening Terhadap Pertumbuhan di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan, 20(2). 193-207
- Supramono,Gatot. 2012. *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara di Indonesia*. Jakarta : PT. Rineka Cipta. Hal 7.
- Swaramiranda, Darma Rika dan Susi Indriani. 2011. *Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Econosains Jurnal Ekonomi dan Pendidikan Vol.9.(2).
- Tarigan, Robinson. 2008. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Todaro,Michael P, dan Smith, Stephen C. 2011. *Pembangunan Ekonomi Edisi Kesebelas*. Jakarta : Penerbit Erlangga.
- Tuasikal, Askam. 2008. *Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah*

Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. JURNAL TELAAH & RISET AKUNTANSI Vol. 1 (2).

- Wibowo, Waris. 2019. *Kaltim, Provinsi Terluas Kedua Dengan Sumber Daya Alam Melimpah.* SINDOnews.com. 26 Agustus 2019. <https://nasional.sindonews.com/berita/1433546/15/kaltim-provinsi-terluas-kedua-dengan-sumber-daya-alam-melimpah>.
- Widarjono, Agus. 2007. *Ekonometrika Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis.* Yogyakarta : EKONISIA FE UII.
- Wulandari, Yolanda. 2014. *Pengaruh Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Indonesia.* Ejurnal Universitas Negeri Padang. Vol 2 (1).
- Yani, Ahmad. 2008. *Hubungan Keuangan Antara Pemrintah Pusat Dan Daerah.* Jakarta : PT Raja Grafindo.
- Zahari, Muhammad. 2017. *Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi.* Ekonomis: Journal of Economics and Business.

